



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN  
(LKPJ) PERANGKAT DAERAH**

**BAGIAN PEMBANGUNAN  
SETDA KABUPATEN BERAU  
PROPINSI KALIMANTAN TIMUR**

**TAHUN 2018**



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan APT. Pranoto No. 1 Telp. (0554) 21008,21076,21015 Fax. 21068  
Tanjung Redeb - Berau

---

### **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah**

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 7 Tanggal 26 Nopember Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

#### **1.2 Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah**

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 212 ayat (1) undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau dan Dasar Hukum Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah adalah Peraturan Bupati Berau Nomor 47 Tanggal 21 Desember Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau

#### **1.3 Nama Perangkat Daerah**

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Berau, maka perlu diatur Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Berau yaitu nama Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah Bagian Pembangunan

#### **1.4 Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan**

Urusan Pemerintahan Yang Dilaksanakan (Wajib/Pilihan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu

adalah urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

### 1.5 **Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK)**

Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Bagian Pembangunan Per 31 Desember 2018 (Terlampir).

#### 1. Kepala Bagian Pembangunan

- a. Kasubag Bina Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
- b. Kasubag Sarana dan Prasarana
- c. Kasubag Bina Sumber Daya

Dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Bagian Pembangunan Per 31 Desember 2018

**1.6 Daftar Urut Kepangkatan (DUK)**

## BAB. II

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

#### 1. Program, Kegiatan dan Anggaran Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2018.

NO	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH.	
1.	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Rp. 290.537.000,-
2.	Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana APBD Kabupaten Berau	Rp. 292.444.000,-
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rp. 317.019.000,-
4.	Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan	Rp. 0,-

#### 2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan DPPA OPD Tahun 2018.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut :

2.1. **Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH** dengan anggaran Rp. 290.537.000,- Realisasi Keuangan Rp. 284.302.000,- dan Realisasi Fisik 97,85 %. Capaian yang telah dilaksanakan adalah Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian yang dilaksanakan di 13 Kecamatan (Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Segah, Kelay, Pulau Derawan, Tabalar, Biatan, Batu Putih, Talisayan, Teluk Bayur, Biduk-biduk dan Maratua). sehingga Kegiatan Pembangunan sesuai mutu, sasaran dan tepat waktu.

2.2. **Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana APBD Kabupaten Berau** anggaran Rp. 292.444.000,- Realisasi Keuangan Rp. 292.444.000,- dan Realisasi Fisik 96,68 %.

Capaian yang telah dilaksanakan adalah dengan mengevaluasi pelaporan SKPD, dengan melakukan monitor dan evaluasi serta pendampingan terhadap seluruh SKPD maupun kepada 13 Kecamatan yang mengalami daya serap anggaran yang rendah. Dengan demikian pelaporan kemajuan

realisasi fisik dan keuangan akan terealisasi yang berdampak terhadap daya serap anggaran.

- 2.3. **Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** anggaran 317.019.000,- Realisasi Keuangan Rp. 310.365.800,- dan Realisasi Fisik 97,90 %.

Capaian yang telah dilaksanakan adalah melaksanakan fungsi koordinasi dan sinkronisasi terhadap seluruh SKPD dengan melakukan rapat-rapat secara berkala sehingga capaian nya, Adanya Kesamaan Presepsi dan Pertauran Perundangan yang berlaku.

- 2.4. **Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan** anggaran Rp. 0,- , Realisasi Keuangan Rp. 0,- dan Realisasi Fisik 0 %.

Capaian yang telah dilaksanakan adalah melakukan evaluasi terhadap pelaporan SMEP ONLINE dengan melakukan pemeliharaan terhadap sistem pelaporan yang digunakan oleh pengguna sistem / SKPD, sehingga capaiannya pengguna SMEP ONLINE tidak mengalami hambatan dalam input kemajuan realisasi fisik dan keuangannya akan tetapi anggarannya tidak ada pada tahun 2018.

### **3. Permasalahan dan Solusi.**

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH.

#### **A.3. Permasalahan :**

##### **A.3.1. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.**

###### **Permasalahan :**

3.1.1. Memberikan masukan kepada PPK untuk melaksanakan pekerjaan yang ada pada kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan diharapkan berdasarkan perencanaan/pelelangan tidak mengalami keterlambatan yang akan berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan.

3.1.2. Kurangnya Koordinasi Penanggung Jawab Kegiatan pada SKPD terhadap Kendala dan Hambatan Kegiatan/Pekerjaan.

- 3.1.3. Kurangnya data penunjang dari PPK dalam melaksanakan kegiatan monitoring ke lapangan (Kontrak Pekerjaan).
- 3.1.4. Masih banyak pekerjaan yang belum termonitor karena keterbatasan biaya monitoring kelapangan.
- 3.1.5. Membuat usulan penambahan volume biaya perjalanan dinas dalam daerah (Kecamatan) dan biaya bahan bakar untuk operasional Perjalanan ke Lokasi 13 Kecamatan

**A. 3.2. Kegiatan Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana APBD Kabupaten Berau Permasalahan :**

- 3.2.1. Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan secara langsung kepada SKPD terhadap input data ke SMEP ONLINE.
- 3.2.2. Capaian Progres Rendah
- 3.2.3. Input data kemajuan realisasi fisik dan keuangan seringkali dilakukan terlambat atau mendekati batas akhir.

**A.3.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

**Permasalahan :**

- 3.3.1. Minimnya koordinasi penanggung jawab kegiatan jika terjadi hambatan/permasalahan pada program/kegiatan di lapangan

**A.4.3. Kegiatan Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan.**

**Permasalahan :**

- 4.3.1. Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelola Sistem masih sangat terbatas.
- 4.3.2. Pengguna Sistem/SKPD mengalami kesulitan dalam input pelaporan karena jenis pelaporan yang wajib di input lebih dari satu Sistem yang mempunyai Output yang sama

**B.3. Solusi**

### **B.3.1. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.**

#### **Solusi :**

- 3.1.1. Tidak tercukupinya waktu yang digunakan di akhir tahun anggaran dikarenakan banyak pekerjaan yang jadwal pelaksanaannya baru selesai diakhir tahun dan tidak tersedianya kendaraan operasional yang mendukung untuk kelengkapan karena kegiatan yang akan dimonitor dan dievaluasi tersebar di 13 Kecamatan dengan jadwal yang bersamaan
- 3.1.2. Mengusulkan penambahan volume, biaya dan kendaraan operasional yang sesuai yang mendukung untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- 3.1.3. Melakukan Rapat Koordinasi dan Pengendalian Terhadap PA/KPA/PPK dan PPTK

### **B.3.2. Kegiatan Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana APBD Kabupaten**

#### **Berau Solusi :**

- 3.2.1. SKPD lambat dalam menyerahkan, memberikan data kemajuan realisasi fisik dan keuangan Kegiatan/ Input data ke SMEP ONLINE.
- 3.2.2. Melakukan evaluasi terhadap pencapaian progres kemajuan realisasi fisik dan keuangan terhadap SKPD yang mengelola Program/Kegiatan agar menyampaikan laporan dan input data tepat waktu
- 3.2.3 Memberikan batasan waktu kepada SKPD yang bertanggung jawab terhadap program/kegiatan yang dikelolanya untuk melakukan tanggung jawab terhadap input data yang dilakukan secara tepat waktu dan prioritas.

### **B. 3.2. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

#### **Solusi :**

- 3.2.1. Surat Edaran, sosialisasi dan meningkatkan fungsi koordinasi

#### **B.4.2. Kegiatan Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan.**

##### **Solusi :**

- 4.2.1. Melakukan Sosialisasi dan pembekalan teknis terhadap SKPD untuk pelaksanaan Sistem
- 4.2.2. Memberikan masukan untuk menyederhanakan sistem yang di input sehingga dengan satu input yang dilakukan Output yang dihasilkan tercapai dan sama serta terkoneksi dan terintegrasi satu sistem dengan sistem yang lain

#### **C. Kebijakan**

##### **C.2.1. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.**

###### **Kebijakan :**

- 2.1.1. Usulan Penambahan Volume, dan Biaya Operasional  
Mengusulkan tambahan Kendaraan Operasional yang sesuai sebagai sarana penunjang kegiatan
- 2.1.2. Mengusulkan penambahan volume, biaya dan kendaraan operasional yang sesuai yang mendukung untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- 2.1.3. Surat Edaran
- 2.1.4 Rapat evaluasi yang dilaksanakan per Triwulan
- 2.1.5. Surat Edaran

##### **C.2.2. Kegiatan Tim Evaluasi dan Pelaporan Dana APBD Kabupaten Berau**

###### **Kebijakan :**

- 2.2.1. Surat Edaran
- 2.2.2. Monitoring ke seluruh Kecamatan.
- 2.2.3. Rapat evaluasi yang dilaksanakan per Triwulan.

##### **C.2.3. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

**Kebijakan :**

- 2.3.1. Surat Edaran
- 2.3.2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi
- 2.3.3. Meningkatkan fungsi dan kualitas koordinasi.

**C.2.4. Kegiatan Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan.**

**Kebijakan :**

- 2.4.1. Sosialisasi
- 2.4.2. Peningkatan SDM dengan melakukan Pembekalan  
Teknis/PelatihanMembuat usulan penyederhanaan sistem yang  
terkoneksi dan terintegrasi.

### **BAB. III**

#### **PENYELENGGARAAN TUGAS PERBANTUAN**

Tugas pembantuan merupakan penugasan kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Penyelenggaraan tugas pembantuan dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kemajuan dan kemakmuran masyarakat. Tugas pembantuan dilakukan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Tugas pembantuan diselenggarakan dalam rangka mengembangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Dalam hal ini Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Berau tidak menyelenggarakan tugas pembantuan.

## BAB. IV

### PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah ( Mou OPD Kabupaten Berau dengan OPD Pemkab/Pemkot Provinsi Kaltim, Pemprop, Kaltim, Pemkab/Pemkot/Pemprov. Luar Kaltim dan Pusat) yang berlaku s.d Tahun 2018 yang terdiri dari :
  - a. Kebijakan dan Kegiatan  
Tidak Ada
  - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan  
Tidak Ada
  - c. Permasalahan dan Solusi  
Tidak Ada
  
2. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (Mou OPD Kabupaten Berau dengan Pihak Ketiga) yang berlaku s.d Tahun 2018 yang terdiri dari :
  - a. Kebijakan dan Kegiatan  
Tidak Ada
  - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan  
Tidak Ada
  - c. Permasalahan dan Solusi  
Tidak Ada
  
- d. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah Pada Tahun 2018 yang terdiri dari :
  - a. Kebijakan dan Kegiatan  
Tidak Ada
  - b. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan  
Tidak Ada
  - c. Permasalahan dan Solusi  
Tidak Ada

## **BAB. V**

### **PRESTASI YANG DIRAIH**

1. Provinsi ( Tidak Ada )
2. Nasional (Tidak Ada )
3. Lembaga lain non pemerintah ( Tidak Ada )

## **BAB. VI**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Sesuai tugas dan fungsi pokok Bagian Pembangunan mempunyai Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH dengan Kegiatan Sebagai Berikut :

1. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
2. Tim Pelaporan Evaluasi Dana APBD Kabupaten
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan dan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Aplikasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan.

Dan terkait dengan tugas dan fungsi pokok Bagian Pembangunan untuk melakukan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian terhadap program dan kegiatan APBD Kabupaten maupun APBD Propinsi agar tepat waktu, mutu dan sasaran, maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan serta Pengendalian yang dilaksanakan terhadap seluruh SKPD pada kegiatan/pekerjaan yang dikelola masing-masing SKPD di 13 Kecamatan.

Dengan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta sinkronisasi dan koordinasi yang dilakukan dapat memberikan percepatan anggaran diantaranya capaian kemajuan realisasi fisik dan keuangan yang tepat waktu, pekerjaan yang tepat sasaran dan mempunyai kualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kualitas koordinasi yang dilakukan sehingga dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa mempunyai kesamaan persepsi terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku.

#### **2. Saran**

Beberapa saran yang disampaikan sebagai berikut :

1. SKPD dapat menyerahkan dan melakukan input progres kemajuan realisasi fisik dan keuangan tepat waktu
2. Monitoring terhadap program/kegiatan/pekerjaan dilaksanakan dengan optimal dan tepat sasaran
3. Koordinasi dan komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dengan pejabat eksekutif dapat dilakukan secara berkala

4. Rapat koordinasi dan evaluasi sebagai salah satu prioritas utama agenda tetap

Tanjung Redeb, 28 Februari 2019  
Kepala Bagian Pembangunan

**RUSNAN HEFNI**

Pangkat : Pembina ( IV.a )  
NIP.19711110 199803 1 012